RENCANA STRATEGIS

Tahun 2019-2024

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Alamat : Jalan Sunan Drajat No. 15-Sumber

Telp : (0231) 8330580

Email : diskominfo@cirebonkab.go.id

Website : www.diskominfo.cirebonkab.go.id

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Integrasi sinergis antara kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumber daya lain diperlukan untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan agar Perangkat Daerah menyusun Renstra beserta perubahannya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun. Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menyusun Renstra tahun 2019–2024, yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana Strategis disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yanfg telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan

masyarakat, perkembangan IPTEK dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renstra yang telah disusun ini masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Sumber, November 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON

SUGENG DARSONO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620718 19863 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI .....
DAFTAR TABEL .....
DAFTAR GAMBAR .....
BAB I PENDAHULUAN .....
1.1. Latar Belakang .....
1.2. Landasan Hukum .....
1.3. Maksud dan Tujuan .....
1.4. Sistematika Penulisan .....

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi .....
2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas .....
2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat .....
2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik .....
2.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Statistik dan Persandian .....
2.1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Aplikasi Informatika .....
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika .....
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ....
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika .....

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....
3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah .....
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....
3.3.1. Nawacita .....
3.3.2. Renstra Kementerian Kominfo RI .....
3.3.3. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat .....
3.3.4. Renstra Badan Pusat Statistik .....
3.3.5. Renstra Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Negara.....
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis .....

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....
4.1. Tujuan .....
4.2. Sasaran .....

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....
6.1. Rencana Program .....

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ....

BAB VIII PENUTUP .....
8.1 Kesimpulan .....
8.2 Kaidah Pelaksanaan .....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ..
Tabel 2.2 Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan .....
Tabel 2.3 Kondisi Pegawai Berdasarkan Golongan .....
Tabel 2.4 Kondisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....
Tabel 2.5 Kondisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....
Tabel 2.6 Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon .....
Tabel 2.7 Hasil Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon .....
Tabel 2.8 Data Sistem Informasi Manajemen Kabupaten Cirebon Tahun 2018 .....
Tabel 2.9 Data Sebaran Hotspot Area Publik .....
Tabel 2.10 Data Retribusi Menara Telekomunikasi .....
Tabel 2.11 Data Provider yang Beroperasi di Kabupaten Cirebon .....
Tabel 2.12 Target dan Realisasi Anggaran Periode 2015 – 2019 .
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan .....
Tabel 3.2 Keterkaitan Visi dan Misi Daerah .....
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terhadap Sasaran Renstra Badan Pusat Statistik .....
Tabel 3.4 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon terhadap Sasaran Renstra Lembaga Sandi Negara .....
Tabel 4.1 Domain, Aspek, Indikator, Pembobotan SPBE .....
Tabel 4.2 Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses .....
Tabel 4.3 Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis
Tabel 4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD
Tabel 5.1 Analisis Faktor Internal dan Eksternal .....
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....
Tabel 5.3 Keterkaitan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah .....

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Lainnya .....
Tabel 7.3 Indikator Kinerja yang Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 .....
Tabel 7.4 Formulasi Indikator Tujuan .....
Tabel 7.5 Formulasi Indikator Sasaran.....
Tabel 7.6 Formulasi Indikator Program .....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah .....

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon .....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan komunikasi dan informasi, urusan statistik dan urusan persandian, dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang Komunikasi dan Informatika. Dengan terbentuknya dinas ini, diharapkan masyarakat memperoleh dan memanfaatkan informasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sedangkan bagi pemerintah diharapkan terwujudnya implementasi *e-government*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya rencana strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berkewajiban menyusun rencana strategis. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi : ”Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan

Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat.

Keterkaitan antara dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah penjabaran RPJMD, terkait dengan program dan kegiatan perangkat daerah dalam mendukung prioritas Bupati. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar bagan alir diatas yang sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Seiring dengan tuntutan agar pemerintah lebih efektif dan efisien di satu sisi dan di sisi lain pihak dunia usaha dan masyarakat dapat berperan lebih besar dalam berbagai kegiatan pembangunan, maka Pemerintah Kabupaten Cirebon harus lebih memantapkan fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan *controller* sehingga pengendalian pembangunan kepada masyarakat tetap terjaga.

Adapun agenda kerja tim penyusun renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Agenda Kerja Penyusunan Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Kegiatan	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV				Bulan V				Bulan VI				Bulan VII				Bulan VIII				Bulan IX				Bulan X				Bulan XI				Bulan XII			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	Persiapan Penyusunan Renstra PD																																																
B.	Penyusunan Rancangan Renstra PD																																																
C.	SE – KDH ttg Ranwal RPJMD																																																
D.	Penyesuaian Rancangan Renstra																																																
1.	Penyampaian Rancangan Renstra																																																
2.	Verifikasi rancangan renstra																																																
E.	Musrenbang RPJMD																																																
F.	Penetapan RPJMD																																																
G.	Penyusunan Rankir Renstra PD																																																
H.	Penetapan Renstra PD																																																

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Review Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4438);
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700);
e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5952);
f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4698);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

l. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 182);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

n. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Operangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2011, Seri E.5);

q. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 2 SERI E.2);

s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038.

t. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon;

v. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

w. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digamarkan dalam bentuk priogram dan kegiatan terkait urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian yang harus dilaksanakan oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2019-2024.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024;

c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan arget indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika Penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO

Bab ini memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon untuk 5 tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif Pendanaan Untuk masa 5 tahun yang akan datang.

BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi tentang kinerja bidang urusan Komunikasi dan Informatika yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pelaksanaan kinerja, ketersediaan anggaran (sesuai/tidak sesuai kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan kinerja.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Upaya mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tinggi merupakan upaya strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai dengan tugas dan fungsinya beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, diantaranya adalah:

1. Layanan informasi publik;
2. Layanan komunikasi publik dan pengaduan masyarakat;
3. Layanan komunikasi intra pemerintah daerah;
4. Layanan Data Center, *Disaster Recovery Center* dan *Command Center*;
5. Layanan penggunaan domain dan sub domain pemerintah;
6. Layanan keamanan informasi;
7. Layanan data statistik sektoral;
8. Layanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, salah satu satuan kerja perangkat daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang diwadahi dalam bentuk dinas daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu untuk mengatur

Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon maka ditetapkan Peraturan Bupati Cirebon Nomot 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas pokok "Menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian".

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis diseminasi informasi dan statistik;
b. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis telematika dan persandian;
c. penyelenggaraan pengawasan danpengendalian pelaksanaan tugas urusan komunikasi dan informatika;
d. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan *e-Government*, informasi dan infrastruktur telematika;
e. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
f. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
g. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 sebagai berikut :

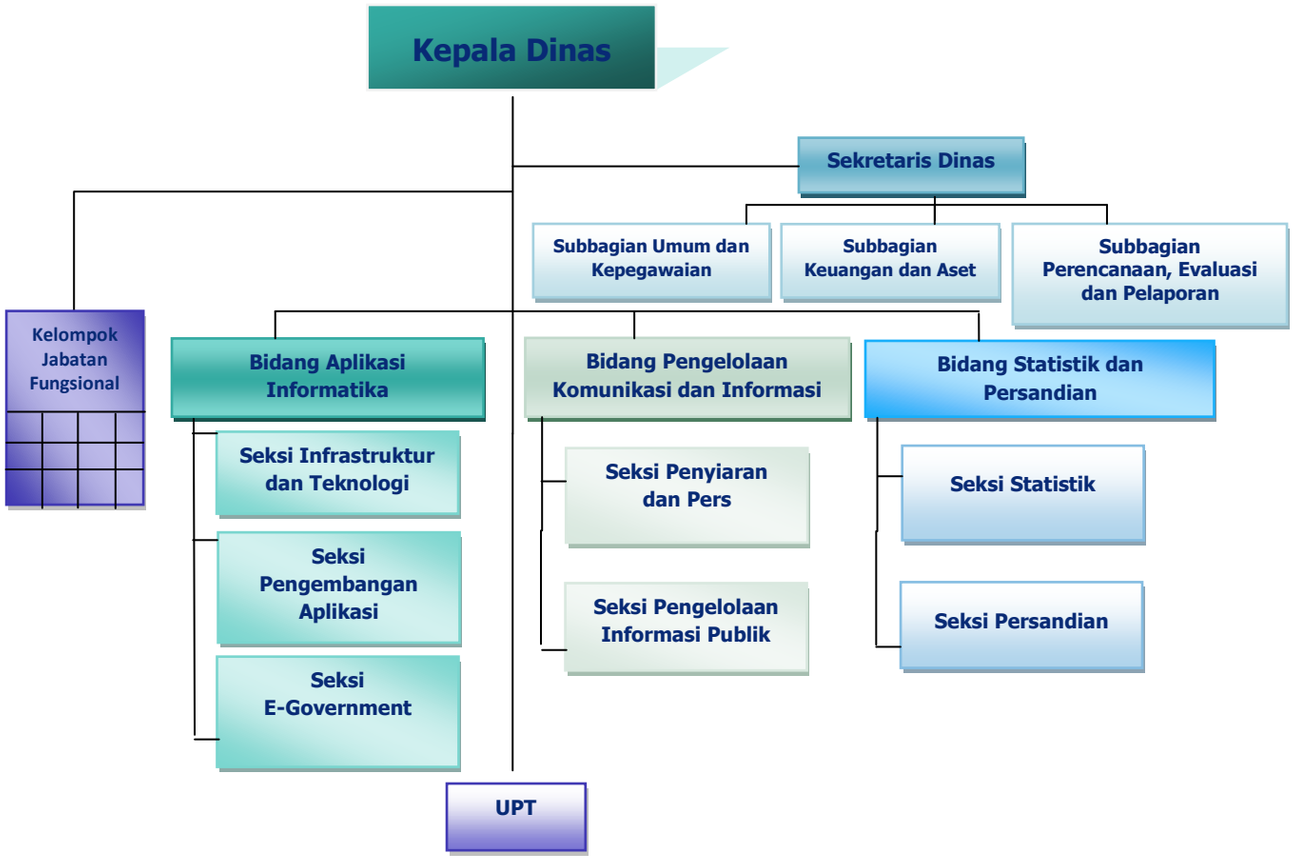

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1) penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis diseminasi informasi dan statistik;
2) penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis telematika dan persandian;
3) penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas urusan komunikasi dan informatika;
4) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan *e-Govemment*, informasi dan infrastruktur telematika;
5) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

6) penyelenggaraan koordinasi dan keijasama dalam rangka tugas dan fungsi Dinas;
7) penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi :

1) Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
2) pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;
3) pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
4) pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
5) penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
6) pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
8) penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

A. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
3) pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
4) pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
5) pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
6) pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas;
7) penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tiap-tiap unit kerja;
8) pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
9) penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatiham, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
10) penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
11) pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
12) pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
13) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
14) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
15) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

B. Subbagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1) pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
2) pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
3) pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
4) penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas
5) pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;
6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
7) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
8) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan dan Aset (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan anggaran, penatausahaan keuangan, dan pencatatan aset.

C. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2) penyusunan bahan rencana dan program Dinas;
3) pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kinerja tiap unit kerja di Dinas;
4) pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
5) pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan laporan dan evaluasi kinerja Dinas;
6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
7) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
8) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas.

2.1.3 Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai fungsi:

1) perumusanrencana kerja bidang;
2) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
5) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten;
6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di kabupaten; dan

7) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi dan informasi publik.

A. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2) pelaksanaan pelayanan informasi publik;
3) pengelolaan opini dan aspirasi publik /database informasi;
4) penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
5) penyiapan bahan Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP;
6) pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7) penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8) penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
9) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas pokok melakukan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan informasi publik.

B. Seksi Penyiaran dan Pers

Seksi Penyiaran dan Pers mempunyai fungsi :

1) penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
2) pelaksanaan penerbitan media pemerintah daerah;
3) penyiapan bahan kelembagaan pers;
4) pengembangan kerjasama/kemitraan dengan Media Cetak;
5) pelaksanaan pelatihan Jurnalistik bagi Siswa SLTP/SLTA;
6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyiaran dan Pers dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiaran dan Pers (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Penyiaran dan Pers mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Penyiaran dan Kelambagaan Pers.

2.1.4. Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi :

1) Perumusan rencana kerja Bidang;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang statistik dan persandian;

3) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik dan persandian;
4) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang statistik dan persandian;
5) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang statistik dan persandian;
6) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik dan persandian; dan
7) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang Statistik dan Persandian (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Statistik dan Persandian.

A. Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai fungsi :

1) penyusunan rencana dan program kerja Seksi;
2) penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah;
3) pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah;
4) penyusunan dan pengumpulan data PDRB;
5) pengolahan, updating dan analisis data PDRB;
6) penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;
7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi; dan
8) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Statistik (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan, analisis dan penyusunan data statistik lokal, pengembangan data dan informasi.

B. Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana dan program kerja Seksi;
2) pengumpulan, penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan sandi;
3) penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang persandian;
4) pelaksanaan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
5) pelaksanaan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
6) pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
7) penyiapan bahan pembinaan peningkatan kesadaran pengamanan informasi, sumber daya komunikasi dan informasi;
8) pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
9) penyusunan bahan perancangan pola hubungan komunikasi antar perangkat daerah;
10) penyusunan bahan instrumen pegawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi;
11) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi; dan
12) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Persandian (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Persandian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi sandi, perangkat sandi dan keamanan informasi.

2.1.5. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

1) penyusunan rencana dan program kerja Bidang;
2) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Cirebon;
3) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Cirebon;
4) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Cirebon;
5) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*,

layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Cirebon;

6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten Cirebon;
7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang; dan
8) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastuktur dasar data center, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten/kota.

A. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana dan program kerja Seksi;
2) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
3) pelaksanaan Layanan Infrastruktur *Data Centre* (Pusat Data), *Disaster Recovery Centre*(Pusat Pemulihan pasca bencana) dan TIK Pemerintah Kabupaten;

4) pelaksanaan layanan akses Internet dan Intranet;
5) penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan kebijakan teknis infrastruktur telematika;
6) pelaksanaan layanan penanganan insiden keamanan informasi, dan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah;
7) Penyelenggaraan penyuluhan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
8) Pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik serta audit TIK;
9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi; dan
10) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Infrastruktur dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana prasarana telematika.

B. Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana dan program kerja Seksi;
2) penyusunan bahan pengkajian dan pengembangan sistem informasi;
3) Pelaksanaan layanan integrasi sistem informasi;
4) pelaksanaan layanan interaksi elektronik pemerintah dan masyarakat;
5) pelaksanaan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan;
6) pelaksanaan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
7) pelaksanaan layanan interoperabilitas dan interkonektivitas sistem informasi layanan publik dan kepemerintahan;

8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi; dan
9) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang terintegrasi.

C. Seksi *e-Government*

Seksi *e-Government* mempunyai fungsi:

1) penyusunan rencana dan program kerja Seksi;
2) perencanaan dan pengembangan kebijakan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi daerah;
3) pelaksanaan layanan koordinasi kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah;
4) pelaksanaan layanan manajemen data informasi *e-Government;*
5) pelaksanaan layanan keamanan informasi *e-Government;*
6) penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart Regency*;
7) penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Kabupaten;
8) pelaksanaan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK;
9) Pelaksanaan layanan implementasi *e-Government;*
10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

tugas Seksi; dan

11) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi *e-Government* dipimpin oleh seorang Kepala Seksi *e-Government* (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi *e-Government* mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi penyelenggaraan *Governm ent Chief Information Officer (GCIO)* serta pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon saat ini berkedudukan dan menempati kantor dengan alamat Jl. Sunan Drajat No. 15 – Sumber, telepon (0231) 8330580 kode pos 45611.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana pelayanan serta unit usaha yang masih operasional. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai input dalam pelaksanaan tugasnya.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai uraian tugas dan struktur organisasi di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki pegawai sebanyak 52 (lima puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut:

A. Komposisi Status Kepegawaian

Tabel 2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	24	46%
2	CPNS	0	0%
3	Honorer	28	54%
		52	**100%**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2019

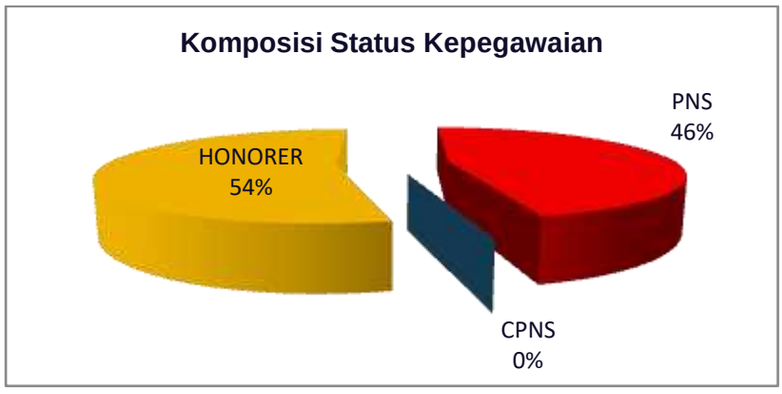

B. Komposisi Eselon PNS

Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Es-I	Es-II	Es-III	Es-IV	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretariat			1	3	5	9
3	Bidang Aplikasi Informatika			1	3	1	5
4	Bidang Statistik dan Persandian			1	2	2	5
5	Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik			1	2	1	4
	Jumlah		**1**	**4**	**10**	**9**	**24**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2019

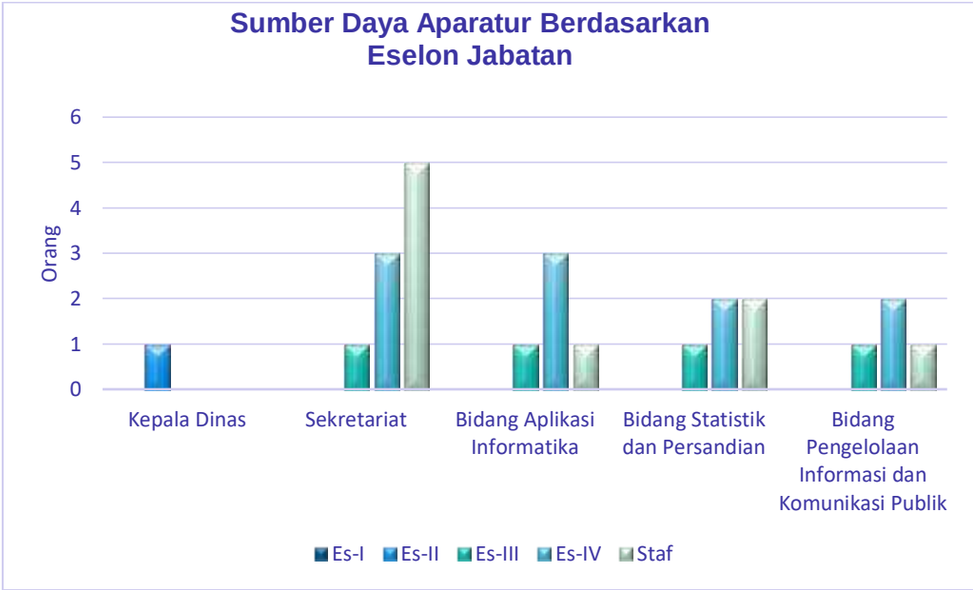

C. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	5	3		9
3	Bidang Aplikasi Informatika	1	3	1		5
4	Bidang Statistik dan Persandian	2	2	1		5
5	Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	1	2	1		4
	Jumlah	**6**	**12**	**6**		**24**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2019

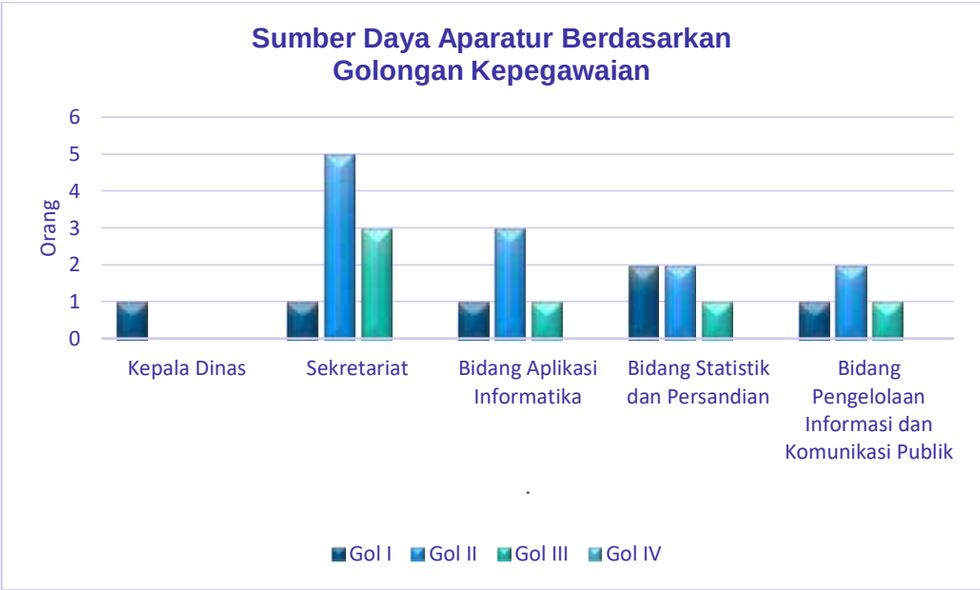

D. Komposisi Pendidikan PNS

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel 1.3

Tabel 2.4 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

No	Uraian	S3	S2	S1	SMA	Jumlah
1	Kepala Dinas		1			1
2	Sekretariat		1	3	5	9
3	Bidang Aplikasi Informatika		1	3	1	5
4	Bidang Statistik dan Persandian		2	1	2	5
5	Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik		2	1	1	4
	Jumlah		7	8	9	24

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo, 2019

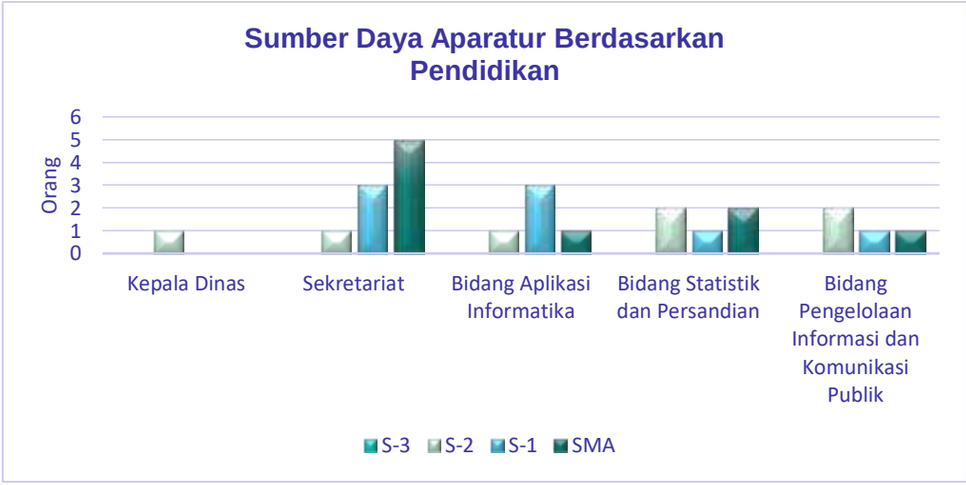

E. Komposisi Jenis Kelamin

Tabel 2.5 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	6	3
3	Bidang Aplikasi Informatika	4	1
4	Bidang Statistik dan Persandian	3	2
5	Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	2	2
	Jumlah	**16**	**8**

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diskominfo

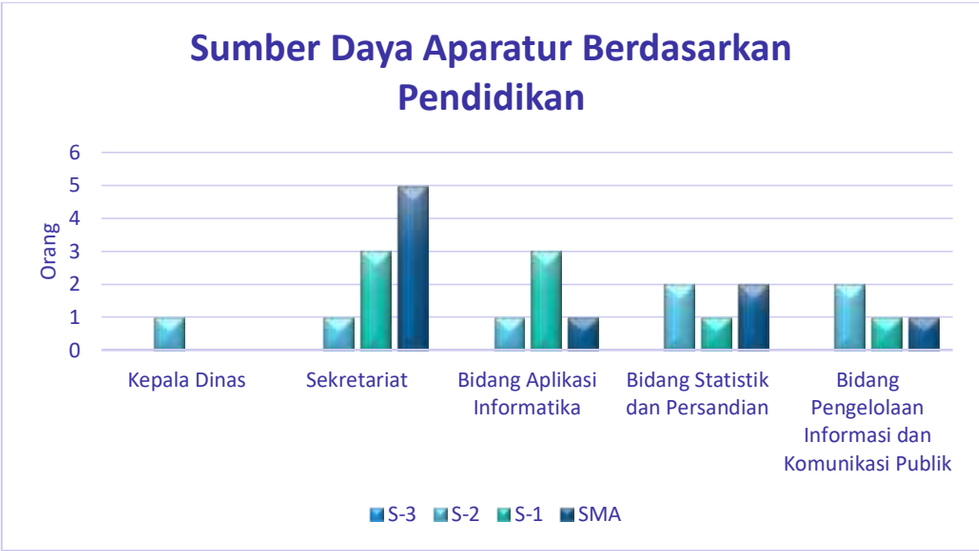

2.2.2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diantaranya peningkatan fasilitas dan perbaikan gedung/kantor serta peralatan yang rusak, penggantian dan pengadaan peralatan kantor, penambahan/ pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional lapangan baik kendaraan roda dua (2) maupun roda empat (4) guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas/ kegiatan. Gambaran mengenai sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Daftar Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

No	Nama Barang	Jumlah
1	Genset/Disel	3
2	Kendaraan Roda 4	7
3	Kendaraan Roda 2	14
4	Mesin Tik	2
5	Filling Kabinet	15
6	Lemari	14
7	Loker	2
8	Lemari Kaca	2
9	Mesin Penghancur Kertas	1
10	Finger Print	2
11	Meja Rapat	2
12	Meja Sidang	1
13	Meja Resepsionis	1
14	Stand office	1
15	Kursi Tunggu	4
16	Kursi Putar/ Rapat	60
17	Meja Komputer	10
18	Meja 1/2 biro	30
19	Sofa	5
20	Vacum cleaner	1
21	Kulkas	1
22	AC	29
23	Exhaust Fan	4
24	Kompor Gas	1
25	Tabung Gas	1
26	Radio Handy Talkie Dua Band	5
27	Radio tape	1
28	Layar monitor kontrol jaringan	1
29	Televisi	10
30	Sound Sistem	3
31	Microphone	5
32	Microphone Radio	1
33	Stabilizer Power (KVA)	1
34	Ladder	1
35	Tangga Alumunium	1
36	Dispenser	2
37	Podium	1
38	Handycam	1
39	Alat Pemadam Kebakaran	3
40	Proyektor	2
41	Rak Server	4
42	Komputer/ PC	54
43	Laptop	10

No	Nama Barang	Jumlah
44	Scaner	2
45	Printer	18
46	Ups	19
47	Meja Kerja 1 biro	14
48	Headphone	5
49	Layar Screen	1
50	Layar Screen (Video Tron)	1
51	Closed Circuit Television	2
52	Kamera Digital	6
53	Layar Scren	1
54	Papan Elektronik	1
55	Screen Multimedia	1
56	Videotron LED Display Outdoor	1
57	GPS Miller	2
58	Faximili	1
59	Radio UHF	4
60	Antena	3
61	Peralatan Jaringan	2

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo, 2019

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja dan anggaran dana.

Tabel 2.7
Hasil Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon Periode 2014-2019

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio Capaian pada tahun n				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	**SPM Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo No.27/PER/M.KOMINFO/12/2010)**															
I	**Pelaksanaan Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional:**															
	a. Media Massa															
	- Majalah	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit	6 terbit		100	100	100	100	
	- Radio	-	-	6 kl	6 kl	18 kl	-	-	6 kl	6 kl		-	-	100	100	
	- Televisi	12 kl	12 kl	6 kl	5 kl	12 kl	12 kl	12 kl	6 kl	5 kl		100	100	100	100	
	b. Media baru															
	- Website	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari	Setiap hari		100	100	100	100	
	c. Media Tradisional (kali/tahun)															
	- Pertunjukan rakyat	13 kl	8 kl	6 kl	6 kl	12 kl	13 kl	8 kl	6 kl	6 kl		100	100	100	100	
	d. Media interpersonal (kali/tahun)															
	- Pembinaan/ pelatihan/ bimtek/ Sosialisasi,dll	8 kl	5 kl	6 kl	5 kl	8 kl	8 kl	5 kl	6 kl	5 kl		100	100	100	100	
	e. Media luar ruang															
	- Selayang pandang	-	2 kl	-	1 kl	1 kl	-	2 kl	-	1 kl		-	100	-	100	
	- Wawar keliling	33 kl	52 kl	52 kl	52 kl	52 kl	33 kl	52 kl	52 kl	52 kl		100	100	100	100	
	- Pemutaran Film	12 kl	12 kl	6 kl	12 kl	12 kl	12 kl	12 kl	6 kl	12 kl		100	100	100	100	
II	**Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakatdi tingkat kecamatan**															
	- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kec	24 kec	24 kec	24 kec	24 kec	40 kec	60%	60%	60%	60%						

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio Capaian pada tahun n				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
2	**IKK (Permendagri 86 Tahun 2017)**															
I	**Urusan Komunikasi dan informatika**															
	1. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	60%	60%	60%	60%	100%	60%	60%	60%	60%		100	100	100	100	
	2. Cakupan layanan telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100	100	100	100	
	3. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a						
	4. Proporsi rumah tangga dengan akses internet	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a						
	5. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a						
II	**Urusan Statistik**															
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	ada	ada	ada	-	-	ada	ada		-	-	100	100	
	Buku "Kabupaten Cirebon dalam angka"			ada	ada	ada	-	-	ada	ada		-	-	100	100	
	Buku "PDRB"	-	-	ada	ada	ada	-	-	ada	ada		-	-	100	100	
III	**Urusan Persandian**															
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	-	n/a	n/a	n/a	n/a		-	-	-	-	
3	**IKU Diskominfo**															
	Tersedianya prasarana dan sarana komunikasi dan informatika	81% 84 titik	86% 90 titik	92% 96 titik	97% 101 titik	100% 104 titik	73% 86 titik	88% 92 titik	109,6% 114 titik	138,4% 144 titik						
	Jumlah pelayanan publik berbasis IT	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	6 jenis	7 jenis	12 jenis	12 jenis						
	Jumlah website instansi pemerintah daerah	28 web	40 web	52 web	64 web	73 web	25 web	31 web	31 web	532 web						

	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Rasio Capaian pada tahun n				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Jumlah penyelenggaraan persandian dan pengamanan informasi	-	-	1 jenis	3 jenis	4 jenis	-	-	1 jenis	4 jenis						
	Prosentase pengawasan menara telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Jumlah dokumen statistik yang akurat dan transparan	-	-	ada	ada	ada	-	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Jumlah SDM yang memiliki kompetensi dan bersertifikat bidang TIK	400 org	155 org	448 org	275 org	665 org	400 org	155 org	448 org	275 org	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah publikasi informasi pembangunan yang tersampaikan	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media	5 media	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, 2019

Pada tabel diatas menunjukan bahwa hampir semua indikator kinerja telah mencapai target. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut :

1. SPM bidang Komunikasi dan Informatika meliputi 2 (dua) jenis pelayanan dasar), yaitu:
   a) Pelaksanaan Diseminasi Informasi (terdapat 5 indikator);
   b) Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (terdapat 1 indikator).

   Jumlah semua indikator bidang Komunikasi dan Informatika adalah 6 (enam) Indikator. Hasil pengumpulan template SPM bidang Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa tahun 2015 – 2018 semua indikator ada datanya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah bidang Komunikasi dan Informatika dalam memberikan layanan minimal secara menyeluruh sudah baik. Indikator yang digunakan sesuai Permen Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 22/PERIM.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota. Capaian beberapa indikator SPM Bidang Komunikasi dan Informatika belum memenuhi target nasional.
2. Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, IKK Dinas Komunikasi dan Informatika mencakup 3 urusan, yaitu:
   a) Urusan Komunikasi dan Informatika (5 indikator)
   b) Urusan Statistik (3 indikator)
   c) Urusan Persandian (1 indikator)

   Pada urusan komunikasi dan informatika terdapat 3 (tiga) indikator yang belum mempunyai data, sementara pada urusan statistik semua indikator telah memenuhi target. Pada urusan persandian belum mempunyai data pendukung.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan 8 (delapan) indikator kinerja utama yang semuanya telah mencapai target yang ditentukan.

2.3.1.1 Kinerja Pelayanan Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memberikan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat terkait dengan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian. Berikut gambaran pelayanan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

1. Media Massa

Pelayanan dan diseminasi informasi kepada masyarakat dilakukan melalui sarana media cetak (surat kabar dan majalah) dan media elektronik (TV dan Radio).

a. Majalah Paseban

Pelayanan informasi berupa media cetak yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah Majalah PASEBAN. Pada realisasinya, majalah tersebut terbit setuiap 2 (dua) bulan sekali dalam setahun yang didistribusikan ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

b. TV dan Radio

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon melaksanakan diseminasi informasi melalui TV dan radio lokal dengan mengundang narasumber dari SKPD di Kabupaten Cirebon.

2. Media Baru *(online)*

Berdasarkan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan untuk urusan Komunikasi dan Informatika bahwa di setiap daerah harus memiliki website pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan sebagai sarana sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Cirebon maupun kegiatan pembangunan. Alamat website Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah *http://www.cirebonkab.go.id/* dan alamat website Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah *http://www.diskominfo.cirebonkab.go.id/*.

Selain itu, Diskominfo Kabupaten Cirebon memanfaatkan media sosial dalam upaya memperluas akses informasi bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki beberapa akun media sosial yaitu

a. FB

Fans Page Facebook resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dapat dikunjungi pada *https://www.facebook.com/diskominfokabcirebon*.

b. Instagram

Akun instagram resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dengan alamat *https://www.instagram.com/diskominfokabcirebon*.

c. Twitter

Akun twitter resmi Peemerintah Kabupaten Cirebon adalah *@cirebonkab*. Akun ini telah terverifikasi *(verified)*.

3. Media Interpersonal

Pelayanan informasi ke aparatur, masyarakat atau pelajar melalui media interpersonal adalah berupa kegiatan pembinaan dan sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta kegiatan pelatihan bidang komunikasi dan informasi.

4. Media Tradisional

Di Kabupaten Cirebon terdapat beberapa kelompok media tradisional yang di wadahi FK METRA yang dilibatkan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

5. Media Luar Ruang

Pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media luar ruang adalah berupa booklet, leaflet, banner dan spanduk. Media luar ruang ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat baik berupa informasi kegiatan pemerintah

daerah, ucapan selamat maupun himbauan kepada masyarakat.

6. **Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**

   KIM merupakan upaya untuk memberdayakan lembaga komunikasi sosial dengan memberdayakan Radio Komunias yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarluaskan informasi khususnya yang berkenaan dengan potensi wilayah sekitarnya.

7. **Penerapan Tata Kelola TIK**

   Berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap sumber daya pemerintahan, didapat tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program smart city sudah berjalan dengan baik dimana didalamnya telaha ada upaya dan pilot project integrasi dan interoperabilitas di dalam proses bisnis pemerintah daerah. Saat ini tercatat sebanyak 20 aplikasi dipergunakan di lingkungan instansi pemerintahan dimana jaringan infrastruktur telekomunikasi sudah tersedia di seluruh Kabupaten Cirebon, baik berbasis kabel FO maupun yang bersifat wireless. Dari segi jangkauan *(coverage)* internet di Kabupaten Cirebon seluruh dinas sudah terhubung dengan jaringan FO sedangkan untuk kecamatan sebanyak 40 dan 12 kelurahan menggunakan wireless. Namun untuk Pemerintah Desa saat ini baru 9 desa yang difasilitasi wireless sedangkan 403 desa lainnya menggunakan internet mandiri yang diselenggarakan Telkom. Untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Cirebon akan menambah jumlah bandwitdh sehingga seluruh desa dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Saati ini kapasitas bandwidth sebesar 800 Mbps. Selain itu Data Center telah dibangun oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon dengan kapasitas 24 server meskipun masih belum memenuhi standar kelayakan data center dan belum mampu menjadi data recovery center namun target minimal Tier 1 pada tahun 2024. Terkait pemberina akses internet kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Cirebon

menyediakna 16 titik hotspot publik. Walapun deminikan, kebutuhan tersebut akan terus bertumbuh dan berkembang setiap tahunnya sesuai dengan peningkatan kebutuhan dan komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan publik berbasis internet dan teknologi komunikasi/informatika. Pengamanan data yang dilakukan dengan memberlakukan password untuk akses data dan menggunakan firewall barracuda untuk server di data center. Operator data center melakukan backup data dan aplikasi secara berkala baik secara manual maupun otomatis. Untuk aplikasdi internal atau sudomain, juga penggunaan subnet berbeda dengan akses publik dengan akses jaringan internal. Untuk lebih menjamin pelaksanaan pelayanan berbasis elektronik dan TIK, Kabupaten Cirebon masih perlu membangun rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan secara komprehensif.

Beberapa aplikasi yang fokus untuk kepentingan pemerintahan sudah dikembangkan oleh Badan/Dinas di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Data Sistem Informasi Manajemen
Kabupaten Cirebon Tahun 2018

No.	Aplikasi dan Perangkat Lunak	Website	*Leading Sector*
1.	Aplikasi akte kelahiran dan kematian	Aktaonline.cirebonkab.go.id	Dinas Dukcapil
2.	Aplikasi proses cek KTP	Ktpel. cirebonkab.go.id	Dinas Dukcapil
3.	Sistem informasi kemiskinan dan penyandang masalah kemiskinan	Pmks. cirebonkab.go.id Simkemiskinan. cirebonkab.go.id	Bappelitbangda Dinas Sosial
4.	Aplikasi e-pajak dan retribusi daerah	Simpad. cirebonkab.go.id	Badan Pendapatan Daerah
5.	Aplikasi perizinan *online*	Izinonline.cirebonkab.go.id	Dinas PMPTSP
6.	Sistem Informasi Investasi	Gis.dpmptsp.cirebonkab.go.id	Dinas PMPTSP
7.	*e-planning* (Perencanaan)	Perencanaan.cirebonkab.go.id	Bappelitbangda
8.	*e-budgeting* (penganggaran)	Sipkd. cirebonkab.go.id	BKAD
9.	*e-inventory* (sistem informasi aset dan barang daerah)	atisisbada.cirebonkab.go.id	BKAD
10	*e-procurement* (pengadaan barang dan jasa)	Ulp.cirebonkab.go.id	LPSE unit layanan PBJ

No.	Aplikasi dan Perangkat Lunak	Website	*Leading Sector*
11.	e-AKIP (pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	esakip.cirebonkab.go.id	Setda
12.	Sistem Informasi kepegawaian	simpeg.cirebonkab.go.id	BKPSDM
13.	Sistem informasi manajemen kearsipan	arsip.cirebonkab.go.id	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
14.	Sistem informasi tata naskah dinas elektronik	tnde.cirebonkab.go.id	Dinas Kominfo
15.	Sistem informasi masyarakat	Jimat.cirebonkab.go.id	Dinas Kominfo
16.	Jaringan data dan informasi hukum	Jdih.cirebonkab.go.id	Setda
17.	Sistem informasi pengaduan masyarakat	Upik.cirebonkab.go.id	Dinas Kominfo
18.	Sistem informasi tenaga kerja	Disnakertrans.cirebonkab.go.id Pmionline.disnakertrans.cirebonkab.go.id	Dinas Nakertrans
19.	Sistem informasi jaringan infrastruktur Kab. Cirebon	Sigi.cirebonkab.go.id	Bappelitbangda, DPUTR
20.	Sistem informasi rujukan kesehatan	Rujukan.cirebonkab.go.id	Dinas Kesehatan
21.	Sistem monitoring dan evaluasi	Simonek.cirebonkab.go.id	Bappelitbangda
22.	Layanan pengadaan secara eletronik	Lpse.cirebonkab.go.id	LPSE

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Dari berbagai aplikasi yang sudah dibuat merupakan sebagai salah satu penunjang smart city dan rencananya aplikasi tersebut akan dikembangkan lagi fiturnya serta dibuat aplikasi baru baik untuk pemerintahan dan pelayanan publik sehingga capaian *e-government* pada Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat berjalan dengan baik.

8. Surat Menyurat Elektronik *(E-Office)*

Dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan administrasi perkantoran yang dilakukan secara elektronik dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi.

9. Infrastruktur Jaringan TIK

Merupakan layanan fasilitasi keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan, sistem informasi, pertukaran data dan informasi dalam rangka mengimplementasikan *e-government* dan layanan publik.

10. Hotspot Area Publik

Untuk memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi Pemerintah Kabupaten Cirebon menyediakan akses WiFi gratis (free hotspot) pada beberapa ruang terbuka publik di beberapa titik strategis wilayah Kabupaten Cirebon. Titik pelayanan akses internet gratis bagi masyarakat dapat dilihat tabel berikut.

Tabel. 2.9 Data Sebaran Hotspot Area Publik

No	Lokasi	No	Lokasi
1	Taman PKK Sumber	9	Kec Suranenggala
2	Kec Palimanan	10	Kec Gunungjati
3	Kec Arjawinangun	11	Kec Plumbon
4	Kec Lemahabang	12	Kec Weru
5	Kec Ciledug	13	Kec Karangsembung
6	Kec Gebang	14	Kec Susukan Lebak
7	Kec Klangenan	15	Kec Babakan
8	Kec Panguragan	16	RSUD Waled

11. SI UPIK

Si UPIK adalah Sistem Informasi untuk mengelola, merespon informasi dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Untuk dapat mengakses dapat berkunjung ke alamat *upik.cirebonkab.go.id*

12. Help Desk PPID dan Sengketa Informasi

Merupakan jenis pelayanan informasi masyarakat yang berkaitan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Para pemohon informasi akan dilayani oleh PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan (SOP). Layanan permohonan informasi akan dipenuhi sesuai dengan SOP dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (7 hari kerja). Apabila permohonan informasi tidak sesuai atau tidak dipenuhi pemohon informasi dapat mengajukan keberatan pengajuan permohonan informasi atau dapat melayangkan surat

permohonan informasi kepada Komisi Informasi Kabupaten Cirebon untuk melakukan mediasi

13. Fasilitasi Komisi Informasi Kabupaten Cirebon

Merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi.

14. Retribusi Menara Telekomunikasi

Berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2016, pelaksanaannya terkendala dengan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 yang menganulir penjelasan Pasal 124 Undang–undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga selama tahun 2016 tidak ada penarikan restribusi menara. Selanjutnya untuk tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Cirebon mengeluarkan kebijakan penarikan retribusi menara melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon. Dengan dasar ketentuan tersebut diatas, proses penarikan retribusi menara dapat dilaksanakan kembal.

Tabel 2.10 Data Retribusi Menara Telekomunikasi

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2014	1.757.729.934	1.623.232.284	92.34
2	2015	2.003.047.972	-	0
3	2016	-	-	-
4	2017	-	-	-
5	2018	1.800.000.000	2.136.552.000	118.70
6	2019	1.500.000.000		

15. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Salah satu layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah layanan telekomunikasi. Keberadaan sarana telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertanian, perdagangan dan pendidikan. Penyediaan jaringan telekomunikasi dan data/internet bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil segera dapat dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain, sekaligus mempercepat pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah. Dilihat dari luas wilayah, cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Cirebon mencapai 100 %. Di Kabupaten Cirebon sampai dengan tahun 2018 baru terdapat 417 buah menara telekomunikasi yang tersebar di 40 kecamatan. Tabel data sebaran MT di Kabupaten Cirebon.

Di Kabupaten Cirebon terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan/penyewaan menara telekomunikasi (tower provider). Menara tersebut umumnya diperuntukkan penempatan BTS milik perusahaan itu sendiri maupun disewakan kepada operator telekomunikasi (telco operator) lain. Data pemilik menara dan operator telekomunikasi di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel II.9

Tabel 2.11
Data provider yang beroperasi di Kabupaten Cirebon

No	Provider
1	PT. Telkomsel
2	PT. Tower Bersama
3	PT. Solusi Tunas Pratama
4	PT. Daya Mitra Telekomunikasi
5	PT. XL Axiata, Tbk
6	PT. Inti Bangun Sejahtera
7	PT. Indosat
8	PT. Centratama Menara Indonesia
9	PT. Hutchison CP Telecommunications
10	PT. Smartfren Telecom
11	PT. Kharisma Persada Mandiri

2.3.1.2. Kinerja Pelayanan Statistik

Pelaksanaan urusan Statistik mulai dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon pada tahun 2017 yang sebelumnya dilaksanakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan urusan statistik yang dimaksud merupakan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data statistik yang bersifat sektoral. Urusan Statistik tersebut bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon.

2.3.1.3. Kinerja Pelayanan Persandian

Sebelum terbitnya Perda Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, urusan persandian dikelola oleh Bagiam Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Pelaksanaanya masih terbatas pada pengelolaan berita yang masuk dan keluar yang bersifat rahasia atau terbatas.

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Periode Sebelumnya

Untuk merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah mengalokasikan anggaran dan merealisasikan anggaran melalui APBD pada periode 2014-2019 sebagai berikut:

Tabel 2.12
Target dan realisasi Anggaran
Periode 2014-2019

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun n					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.548.859.837	1.934.519.018	2.137.219.000	3.769.322.500	4.549.329.700	1.506.454.104	1.856.502.045	2.050.825.683	3.474.942.564		97,26	95,96	95,96	92,19			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.949.660.488	211.860.750	726.762.200	970.100.600	906.892.000	1.852.873.331	210.633.598	697.761.000	937.077.400		95,04	99,42	96,01	96,60			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.900.000	5.250.000	-	18.120.000	24.780.000	9.900.000	4.252.500	-	17.220.000		100	81,00	-	95,03			
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.589.400	36.589.400	38.581.800	41.037.800,	85.987.000	35.077.400	36.589.400	38.581.800	41.037.800		95,87	100	100	100			
5	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	11.821.20	27.818.500	19.784.000	20.000.000	73.704.000	10.271.200	12.987.000	19.784.000	20.000.000		86,89	46,68	100	100			
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.421.184.488	1.469.541.000	2.550.164.400	2.543.733.400	7.547.950.000	3.356.460.200	1.460.504.200	2.487.386.400	2.485.892.000		98,11	99,38	97,54	97,73			

No	Program	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun n					Rata-rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
7	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	67.634.000	99.500.000	53.995.000	85.000.000	103.637.400	67.447.000	98.805.000	53.820.000	84.680.000		99,72	99,30	99,68	99,62			
8	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	17.572.000	49.629.500	107.221.600	131.488.000	210.734.000	17.572.000	49.079.500	107.221.600	131.488.000		100	98,89	100	100			
9	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1.851.424.352	1.899.899.400	1.891.620.800	854.955.200	1.592.902.200	1.832.316.380	1.807.386.320	1.764.246.400	839.068.200		98,97	95,13	93,27	98,14			
10	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik/ Statistik Daerah	-	-	239.885.100	834.483.500	1.413.488.900	-	-	239.885.100	833.561.500		-	-	100	99,19			
11	Program Persandian untuk Pengamanan Informasi	-	-	-	-	232.130.000	-	-	-	-								
	JUMLAH	8.902.824.566	5.734.607.568	7.765.233.900	9.268.241.000	16.741.535.200	8.688.371615	5.536.739.563	7.459.511.983	8.864.967.464		97,6	96,5	96,1	95,6			

Pada tabel diatas menunjukkan pagu anggaran dan realisasi anggaran dari tahun 2015 – 2019. Pada tahun 2016 terdapat kebijakan pemerintah daerah yang mengakibatkan efisiensi anggaran yang berdampak penurunan pagu anggaran. Namun pada tahun 2017 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan karena disamping masuknya dana PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan) juga ada Bantuan Keuangan dari Provinsi (Tahun 2019). Secara garis besar realisasi anggaran rata-rata tiap tahun diatas 95%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan *(treaths)* bagi organisasi adalah faktor lingkungan (baik internal maupun eksternal) yang tidak menguntungkan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Berikut ini akan dijabarkan tantangan pengembangan pelayanan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian sebagai berikut:

a. Ditetapkannya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD 2019-2024 yang telah ditentukan targetnya menuntut kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk bisa memenuhi. Sementara infrastruktur jaringan komunikasi intra pemerintah yang ada belum mampu mengintegrasikan seluruh satuan kerja dengan Data Center yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai syarat utama penerapan SPBE.
b. Ketersediaan informasi publik di era keterbukaan informasi publik dituntut untuk memberikan pelayanan informasi dan komunikasi publik kepada masyarakat dengan cepat dan mudah.
c. Untuk ketersediaan data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan program Satu Data Provinsi dalam West Java Smart Province dan Satu Data Indonesia (SDI) belum terbangun sinergitas antara semua perangkat daerah.

d. Pesatnya kemampuan *hacker* dalam meretas situs-situs pemerintah memaksa Tim IT Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk selalu melakukan *upgrade* keamanan informasi secara berkala dan teratur.
e. Pesatnya pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon perlu memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.
f. Ketersediaan SDM aparatur yang tidak memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan di bidang komunikasi dan informatika menjadi tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi karena selalu bergantung pada pihak eksternal.

2.4.2 Peluang

Peluang menguntungkan berdasarkan hasil análisis lingkungan baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan pelayanan urusan komunikasi dan informatika diantaranya adalah :

a. Tersedianya berbagai regulasi baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi tentang penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan.
b. Kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia membuka kesempatan peran yang lebih luas dan dominan dari Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagaimana tujuan yang dituangkan dalam RPJMD.
c. Kebijakan keterbukaan informasi publik mendorong peran serta masyarakat mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sehingga pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
d. Terbukanya peluang replikasi atau aplikasi berbagi pakai di berbagai daerah mempermudah melakukan inovasi layanan administrasi maupun layanan publik.
e. Adanya regulasi terkait pengendaian dan pengawasan menara telekomunikasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomot 78 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas pokok terdapat 3 (tiga) tugas pokok yang yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dinas yang ada di Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sangat strategis dalam mendukung pelayanan komunikasi dan informasi, utamanya dalam mewujudkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Hal ini tentunya juga harus didukung dengan infrastruktur yang memadai. Sehingga harapan pada lima tahun yang akan datang akan berpengaruh pada kualitas pelayanan berbasis *e–Government*. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan adanya akses informasi yang cepat, mudah dan akurat, belum diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana yang memadai. Selain itu Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan salah satu bentuk pelayanan publik dengan tujuan agar masyarakat dapat dilayani dalam waktu relatif cepat dan transparan. Dalam implementasinya, terdapat kendala yaitu beberapa SIM yang seharusnya bisa diintegrasikan tetapi masih belum terintegrasi dengan baik.

Dalam kaitannya dengan urusan statistik, kurang rapinya pengelolaan data juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Data berada di semua Perangkat Daerah dan tersebar di berbagai bidang namun apabila diperlukan khususnya terkait dengan perencanaan dan pengambilan keputusan, ternyata data yang dimaksud tidak akurat dan

tidak valid. Hal ini tentunya perlu dilakukan pembenahan tata kelola data secara sistematis dan terintegrasi.

Pengamanan informasi menjadi salah satu aspek yang mendapat prioritas pada urusan persandian. Paradigma sandi melebar dan meluas dalam hubungannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan terhadap SDM yang memahami pengamanan informasi secara khusus mutlak diperlukan, selain itu kesadaran Perangkat Daerah dari unsur pimpinan sampai dengan staf terkait pengamanan informasi perlu terus ditumbuhkan.

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran tentang isu strategis yang dikaitkan dengan telaah terhadap visi, misi dan program kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat digambarkan kerangka permasalahan dimana Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 3.1 (T-B.35)
Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan pemerintahan berbasis elektronik belum optimal	1. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal	1. Minimnya penguasaan IT dikalanagan PNS 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan IT
2.	Pelayanan Informasi dan komunikasi publik belum optimal	1. Penyediaan dan diseminasi informasi publik belum optimal	1. Kurangnya sarana dan komunikasi publik dan diseminasi informasi dalam rangka terwujudnya keterbukaan informasi publik
3.	Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Ketersediaan data sektoral belum optimal	1. Belum optimalnya integrasi data
		2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal	*1.* Masih terbatasnya pengelola data sektoral dalam mendukung terwujudnya *open government* 2. Masih rendahnya akses pubik terhadap data sektoral dalam mendukung terwujudnya *open government*
4	Pengamanan informasi pada perangkat daerah belum optimal	1. Tingginya resiko dalam kerawanan keamanan informasi	1. Belum adanya peningkatan kapasitas pengelola persandian dalam rangka peningkatan *Cyber Security* 2. Kurangnya fasilitas saraa pendukung keamanan informasi 3. Belum optimalnya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah
5	Pelayanan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi belum optimal	1. Pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi cukup tinggi	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak keberadaan menara telekomunikasi

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

3.2.1 Visi

Bupati Cirebon mempunyai visi:

"Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman"

Makna dalam visi tersebut adalah :

a. Kabupaten Cirebon BERBUDAYA mempunyai makna mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
b. Kabupaten Cirebon SEJAHTERA mempunyai makna meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
c. Kabupaten Cirebon AGAMIS mempunyai makna meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.
d. Kabupaten Cirebon MAJU mempunyai makna meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
e. Kabupaten Cirebon AMAN mempunyai makna memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

3.2.2 Misi

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang

ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Tabel 3.2 Keterkaitan Visi dan Misi Daerah

Visi	Misi
Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman	1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
	2. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
	3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.
	4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
	5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun ke depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih

NO	VISI/MISI	TUPOKSI DISKOMINFO	PERMASALAHAN	FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
1.	Visi: Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman" Misi 4: Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman"	Menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan tugas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	1. Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal 2. Penyediaan dan diseminasi informasi publik belum optimal 3. Ketersediaan data sektoral belum optimal 4. Pemanfaatan data sektoral belum optimal 5. Tingginya resiko dalam kerawanan keamanan informasi 6. Pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi cukup tinggi	**Penghambat**: a. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal b. Koordinasi internal belum optimal c. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya d. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai **Pendorong:** a. Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi kabupaten Cirebon dalam rangka peningkatan daya saing daerah b. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik c. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral d. Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten Cirebon

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Telaahan terhadap renstra K/L dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan

penentuan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

3.3.1 Nawacita

Dalam visi misi dan program aksi Presiden dan wakil Presiden Jokowi-JK Tahun 2014-2019 telah dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut dengan Nawacita, dimana salah satu dari kesembilan agenda Nawacita tersebut berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, khususnya dalam Nawacita ke-2, yaitu MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA.

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi penentuan isu strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik adalah bagian penting dari perwujudan pemerintahan yang demokratis dan terpercaya. Sedangkan penerapan SPBE dan peran sebagai wali data sektoral yang handal akan menciptakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

3.3.2 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Dalam kurun waktu Tahun 2014-2019 rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI telah mencanangkan beberapa agenda, yaitu :

A. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.

B. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, social, budaya, pertahanan dan keamanan.

C1. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.

C2. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Tabel 3.4
Telaahan Sasaran Renstra
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

No	Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia	Masih terbatasnya sarana dan prasarana di beberapa daerah	Keterbatasan kewenangan Kabupaten	Kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana terus mengalami peningkatan
2.	Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien	1. Tidak adanya kewenangan penentuan lokasi 2. Risiko kehilangan data cukup besar 3. Risiko kontinuitas layanan 4. Rekomendasi penyiaran belum dijadikan sebagai suatu syarat proses perizinan	1. Keterbatasan kewenangan Kabupaten 2. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif	Kebutuhan masyarakat terhadap layanan pos, komunikasi dan informatika makin tinggi
3.	Tersedianya dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indoenasi dalam kerangka NKRI	Masih rendahnya sinkronisasi pelaksanaan program	Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program	Adanya kesamaan fungsi dan wewenang
4.	Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal	1. Masih terbatasnya infrastruktur jaringan komunikasi data; 2. Masih rendahnya kemampuan komunikasi dan informatika aparatur, dunia usaha dan masyarakat 3. Belum optimalnya implementasi kebijakan pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika 4. Masih rendahnya dukungan keberlanjutan program dan anggaran	1. Keterbatasan anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran
5.	Tersedianya standar alat dan mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos komunikasi dan informatika	Belum tersedianta standar alat, standar mutu layanan, dan mekanisme pengawasan	1. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan 2. Keterbatasan kapasitas sumber daya	Kewajiban Perlindungan Konsumen
6.	Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat	1. Keterbatasan kesediaan data 2. Keterbatasan anggaran 3. Perbedaan penentuan prioritas konten di daerah	1. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi 2. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi	1. Kebutuhan masyarakat dan pemerintah atas informasi yang cepqat, murah dan akurat 2. Keberadaan undang-undang keterbukaan informasi publik
7.	Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan penyebaran dan kemanfaatan informasi edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan peran mitra kerja (KIM, FK METRA, Lembaga Penyiaran, dan Media Cetak)	1. Keterbatasan Anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran

No	Sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika	Belum optimalnya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian/perguruan tinggi	Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek	Banyaknya perguruan tinggi di bidang komunikasi dan informatika
9.	Mendorong penciptaan SDM unggul di bidang komunikasi dan informatika	Adanya kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan ketersediaan SDM unggul	1. Keterbatasan anggaran 2. Inkonsistensi penempatan SDM dengan kompetensi	Tersedianya fasilitas peningkatan kapasitas SDM unggul
10.	Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industri komunikasi dan informatika	Tumbuhnya komunitas industri komunkasi dan informatika
11.	Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal	Belum dijadikan priotitas	Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industri komunikasi dan informatika	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
12.	Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional	Belum adanya standarisasi industri dan profesional yang dapat diadopsi	Kewenangan atas hal ini cenderung lebih banyak pada tingkat pemerintah pusat	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
13.	Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika	Dominasi keberadaan dan pemanfaatan produk non domestik	Terbatasnya produk lokal	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
. 14.	Membangun pencitraan positif Negara Indonesia di mata Internasional	Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika	Keterbatasan kapasitas sumber daya	Tersedianya media elektronik maupun non elektronik

3.3.3. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat dalam periode tahun 2018-2023 telah menetapkan sasaran yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Mewujudkan Provinsi Jawa Barat yang informatif;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian, tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi;
4. Terwujudnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Cirebon adalah meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel 3.5
Telaahan Sasaran Renstra
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

No	Sasaran Jangka menengah Renstra Diskominfo Prov Jabar	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE	Pemenuhan variabel pada domain tata kelola SPBE masih belum optimal	1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal 2. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai	Lembaga yang memiliki kewenangan teknologi informasi dan komunikasi kabupaten Cirebon dalam rangka peningkatan daya saing daerah
2.	Mewujudkan Provinsi Jawa Barat yang informatif;	Penyediaan dan diseminasi informasi publik belum optimal	1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal 2. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai	Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pelayan informasi publik
3.	Mewujudkan Penyelenggaraan Persandian, tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi	Tingginya resiko dalam kerawanan keamanan informasi	1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal 2. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai	Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai koordinator penyelenggaraan persandian Pemerintah Kabupaten Cirebon
4.	Terwujudnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	1. Ketersediaan data sektoral belum optimal 2. Pemanfaatan data sektoral belum optimal	1. Kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal 2. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai	Lembaga yang memiliki kewenangan sebagai pusat data dan informasi statistik sektoral

3.3.4.TELAHAAN RENSTRA BADAN PUSAT STATISTIK

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015-2019 adalah "Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua". Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik. Di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas, Badan Pusat Statistik merumuskan sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran strategis Badan Pusat Statistik yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator Sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik.

Tabel 3.6 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Diskominfo Kab Cirebon terhadap Pelayanan Sasaran Renstra Badan Pusat Statistik

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Badan Pusat Statistik	Permasalahan Layanan Diskominfo Kab. Cirebon	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	Belum adanya regulasi yang jelas atara Bappelitbangda, Diskominfo dan BPS dalam hal kewenangan pengelolaan Data Statistik Sektoral	Belum adanya peraturan teknis tentang Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Adanya kepedulian pimpinan terhadap urusan statistik
2	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data *(respondent engagement)*			
3	Memastikan pengendalian mutu ekonomis, efektif dan efisien			
4	Meningkatnya kualitas hubugan dengan pengguna data *(use engagement)*			
5	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN			
6	Meningkatnya kualitas pembinaan dlaam penyelenggaraan SSN			

3.3.5. TELAAHAN RENSTRA LEMBAGA SANDI NEGARA/BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;
4. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;

5. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
12. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
13. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
15. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
16. penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
17. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah

provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;

18. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
19. koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
20. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
21. pengamanan informasi elektronik;
22. pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
23. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
24. penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
25. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
26. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

Tabel 3.6 Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan Diskominfo Kab Cirebon terhadap Pelayanan sasaran Renstra Lembaga Sandi Negara

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Lembaga Sandi Negara	Permasalahan Layanan Diskominfo Kab. Crebon	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan persandian instansi pemerintah	Urusan persandian merupakan urusan yang baru dilaksanakan diskominfo Kab Cirebon sehingga perlu penyesuaian dari semua sumber daya yang ada	Belum adanya tenanga teknis yang berklasifikasi dalam pengamanan informasi milik pemerintah daerah	Adanya kepedulian pimpinan terhadap urusan persandian
2	Menurunnya tingkat resiko keamanan informasi instansi pemerintah		Peralatan persandian yang belum memadai	Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Cirebon
3	Menurunnya tingkat resiko yang dapat diantisipasi melalui saran tindak atau hasil analisis penyandian			

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupatwen Cirebon Tahun 2018-2038, sehubungan dengan pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka perlu adanya penataan sistem jaringan telekomunikasi yang tercantum dalam RTRW, melalui arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang direncanakan pada pasal 18 ayat (1) berisi tentang sistem jaringan prasarana telekomunikasi terdiri atas jaringan terestrial atau kabel, jaringan nirkabel dan jaringan satelit. Pada pasal 18 ayat (3) juga disebutkan bahwa jaringan nirkabel meliputi:

a. Pembangunan stasiun-stasiun komunikasi nirkabel di wilayah kabupaten
b. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan komunikasi telepon nirkabel di wilayah kabupaten

c. Mengoptimalkan menara Base Transceiver Station (BTS) untuk beberapa operator yang mengaturannya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan ruang serta pembangunan infrastruktur eksisting yang telah ada, maka perlu menara bersama merupakan bentuk solusi dari banyaknya jumlah menara telekomunikasi, yang telah memiliki fungsi untuk menyatukan BTS-BTS dari operator yang berbeda sehingga terletak hanya pada satu buah menara dalam satu area jangkauan pelayanan yang sama.

Konsep penataan menara telekomunikasi yang akan disusun memiliki tujuan untuk menggabungkan aspek aktual dari kondisi eksisting dan penataan menara telekomunikasi yang ada saat ini di Kabupaten Cirebon dengan kondisi ideal yang seharusnya dimiliki dan kesesuaian dengan aspek legal yang berlaku, serta turut memperhatikan rencana pertumbuhan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan menggabungkan keempat aspek tersebut maka konsep yang disusun akan memiliki nilai lebih dengan mengacu pada penataan menara telekomunikasi dari sudut pendang teknis, tata ruang, kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan dalam perencanaan.

Khusus yang bersentuhan dengan RT/RW terkait tugas tambahan sebagai Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagai konsekuensi dari Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon telah memberlakukan sistem informasi *cellplan* sebagai alat kendali dan pengawasan. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan jaringan internet yang masih berbasis nirkabel dibutuhkan ruang untuk pembangunan tower. Pada waktu mendatang perlu ditingkatkan dengan penggunaan fiber optik yang juga memerlukan pemanfatan RT/RW. Terkait dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Stratgeis (KLHS) bahwa tidak ditemukan indikasi program dan kegiatan di urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian serta fungsi penunjang pemerintahan yang akan berdampak stratgeis terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon.

Tabel 3.7
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Sasaran Renstra	Permasalahan Pelayanan Diskominfo	Sebagai Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal	Sinkronisasi program belum terwujud	Adanya dukungan dari provinsi dalam pembanguna ducting bersama

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Diskominfo adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pada dua tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika Kabupaten Cirebon jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Diskominfo Kabupaten Cirebon yaitu :

1. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik;
2. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil pembangunan daerah dalam mendukung keterbukaan informasi publik;
3. Masih rendahnya integrasi dan kualitas data ststistik sektoral;
4. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah;
5. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai upaya upaya mendukung pencapaian indikator keberhasilan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Cirebon khususnya misi ke-4 yaitu Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, maka dalam RPJMD Tahun 2019-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang menjadi urusan/kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yaitu **Indeks SPBE.**

Penetapan indeks SPBE sebagai salah satu indikator kinerja sasaran sejalan dengan tujuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan untuk instrumen evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Struktur penilaian Indeks SPBE terdiri dari 3 (tiga) domain, 7 (tujuh) aspek serta 35 (tiga puluh lima) indikator sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Domain, Aspek, Indikator, Pembobotan SPBE

DOMAIN	ASPEK	INDIKATOR	BOBOT
Kebijakan SPBE	Kebijakan Tata Kelola	7	7%
	Kebijakan Layanan	10	10%
Tata Kelola SPBE	Kelembagaan	2	8%
	Strategi dan Perencanaan	2	8%
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	12%
Layanan SPBE	Administrasi pemerintahan	6	33%
	Publik	7	22%

Indikator adalah informasi spesifik dari aspek penyelenggaraan SPBE yang diukur dan dinilai untuk tingkat kematangannya. Sedangkan tingkat kematangan SPBE merupakan kerangka kerja yang mengukur

derajat pengembangan SPBE ditinjau dari tahapan kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2 Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses

1. Rintisan	▪ Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan ▪ Proses tata kelola dilakukan secara *ad hoc*
2. Terkelola	▪ Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di instansi pemerintah ▪ Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan
3. Terstandarisasi	▪ Pengaturan telah ditetapkan dg memenuhi semua kebutuhan instansi pemerintah ▪ Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi
4. Terintegrasi dan Terukur	▪ Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar instansi pemerintah ▪ Proses tata kelola dilaksanakan dg pengukuran kinerja secara kuantitatif
5. Optimum	▪ Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal ▪ Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan

Tabel 4.3 Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis

1. Informasi	▪ Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah
2. Interaksi	▪ Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3. Transaksi	▪ Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
4. Kolaborasi	▪ Layanan SPBE terintegrasi dan layanan SPBE lain
5. Optimalisasi	▪ Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama tahun 2019-2024 yaitu:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel

Tujuan tersebut menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatka Teknologi Informasi dan Komunikasi
2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik
3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
4) Terwujudnya penyelenggaraan persandian

5) Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi
6) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Keterkaitan serta indikator yang akan digunakan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke -					Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Akhir Renstra
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.63 POIN	2.93	3.18	3.38	3.50	3.63
		Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatka Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2.57 POIN	2.84	3.10	3.30	3.42	3.55
		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi public	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55.25 %	56.63	58.05	59.79	61.88	64.05
		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	36,50 %	36,50	50	61	76.50	90
		Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	II LEVEL	II	II	III	III	IV
		Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	10 %	10	9	8	7	6
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	77 POIN	79	80	82	84	85

Keterangan :
Target Indikator Tujuan Indeks SPBE berdasarkan tahun n-1
Target Indikator Sasaran Domain Tata Kelola SPBE berdasarkan tahun n-1
Target Indikator Sasaran Indeks Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan tahun n-1
Target Indikator Sasaran Indeks KAMI berdasarkan tahun n-1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif strategi yang dianalisis menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (aspek kekuatan dan aspek kelemahan) dan faktor eksternal (aspek tantangan dan aspek ancaman). Sehingga, berdasar pada faktor internal fan faktor eksternal tersebut dapat dianalisis lebih lanjut penentuan, pengambilan, serta penerapan strategi maupun kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Berikut merupakan identifikasi dari faktor internal maupun faktor eksternal.

Tabel 5.1
Analisis Faktor Internal dan Eksternal
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Faktor Internal			
No	**Kekuatan (Strength)**	**No**	**Kelemahan (Weakness)**
1	Tersedianya sumber daya aparatur	1	Kualitas dan kuantitas aparatur masih rendah
2	Tersedianya sarana dan prasarana	2	Sarana dan prasarana belum memadai
3	Adanya tugas pokok dan fungsi	3	Kurangnya koordinasi
4	Adanya komitmen dan kebijakan serta dukungan dari Pemda dalam mewujudkan masyarakat informasi	4	Adanya kesenjangan digital dan kesenjangan informasi
6	Adanya jaringan intranet dan internet berbasis Fiber Optik	6	Pemanfaatan jaringan internet dan intranet yang belum optimal
7	Adanya jaringan WAN sampai titik kecamatan dan Kelurahan	7	Pemanfaatan jaringan WAN di tingkat kecamatan belum optimal

8	Perangkat daerah telah memiliki infrastruktur yang memadai	8	Belum adanya kebijakan tertulis pemanfaatan infrastruktur dalam bentuk SOP
9	Hampir semua perangkat daerah memiliki perangkat TIK	9	Spesifikasi perangkat TIK yang harus ditingkatkan
10	Tersedianya tenaga instruktur bidang kerja kominfo	10	Budaya kerja dan penguasaan teknologi komunikasi masih rendah/kurang
Faktor Eksternal			
No	**Peluang (Opportunities)**	**No**	**Ancaman/Tantangan (Threats)**
1	Tersedianya regulasi tentang penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika	1	Ditetapkannya SPBE sebagai indikator kinerja daerah
2	Adanya kebijakan SPBE dan Satu Data Indonesia	2	Belum terbangun sinergitas antara semua perangkat daerah
3	Adanya kebijakan keterbukaan informasi publik	3	Ketersediaan informasi publik yang cepat dan mudah
4	Terbukanya peluang replikasi atau aplikasi berbagi pakai	4	Pesatnya kemampuan hacker
5	Kemampuan dan daya gunaperangkat keras semain canggih	5	Keterbatasan SDM untuk menguasai perangkat keras dan perangkat jaringan

Tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya ketersediaan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, serta responsif khususnya pada keterbukaan informasi publik. Informasi publik berpengaruh terhadap penilaian kinerja publik pada implementasi kebijakan-kebijkan daerah yang tepat sasaran dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan Diskominfo dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2 (T-C.26)

Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

Visi	**:**	**Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman**		
Misi IV	**:**	**Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing dipasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.**		
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Peningkatan ketersediaan infrastruktur TIK dan aplikasi yang terintegrasi	Penguatan infrastruktur TIK, layanan dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik serta peningkatan sumber daya manusia berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik	Penguatan media center, media komunitas, media publik dan kelompok informasi masyarakat sebagai media penyebaran informasi publik

		Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik sektoral yang tervalidasi dan terverifikasi	Meningkatkan kepercayaan pengguna data sektoral terhadap kualitas data yang disajikan
		Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Meningkatkan pembinaan keamanan informasi dan persandian daerah	Penguatan SDM, sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi
		Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Penguatan SDM, sarana dan prasarana pendukung pelayanan
No	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Meningkatkan tata kelola profesional melalui pemenuhan dasar	Meningkatkan operasional administrasi perkantoran, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien

Adapun keterkaitan Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Terhadap Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon dapat dilihat pda tabel berikut.

Tabel 5.3
Keterkaitan Tujuan Sasaran Perangkat Daerah (PD)

Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaan PD (IKU)	Program
Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks SPBE	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Domain Tata kelola SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan layanan statistik daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
			Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks KAMI	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

			Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan kebaraan menara telekomunikasi	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks Kepuasan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
					Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran Dinas Kominfo digambarkan pada *cascading* berikut :

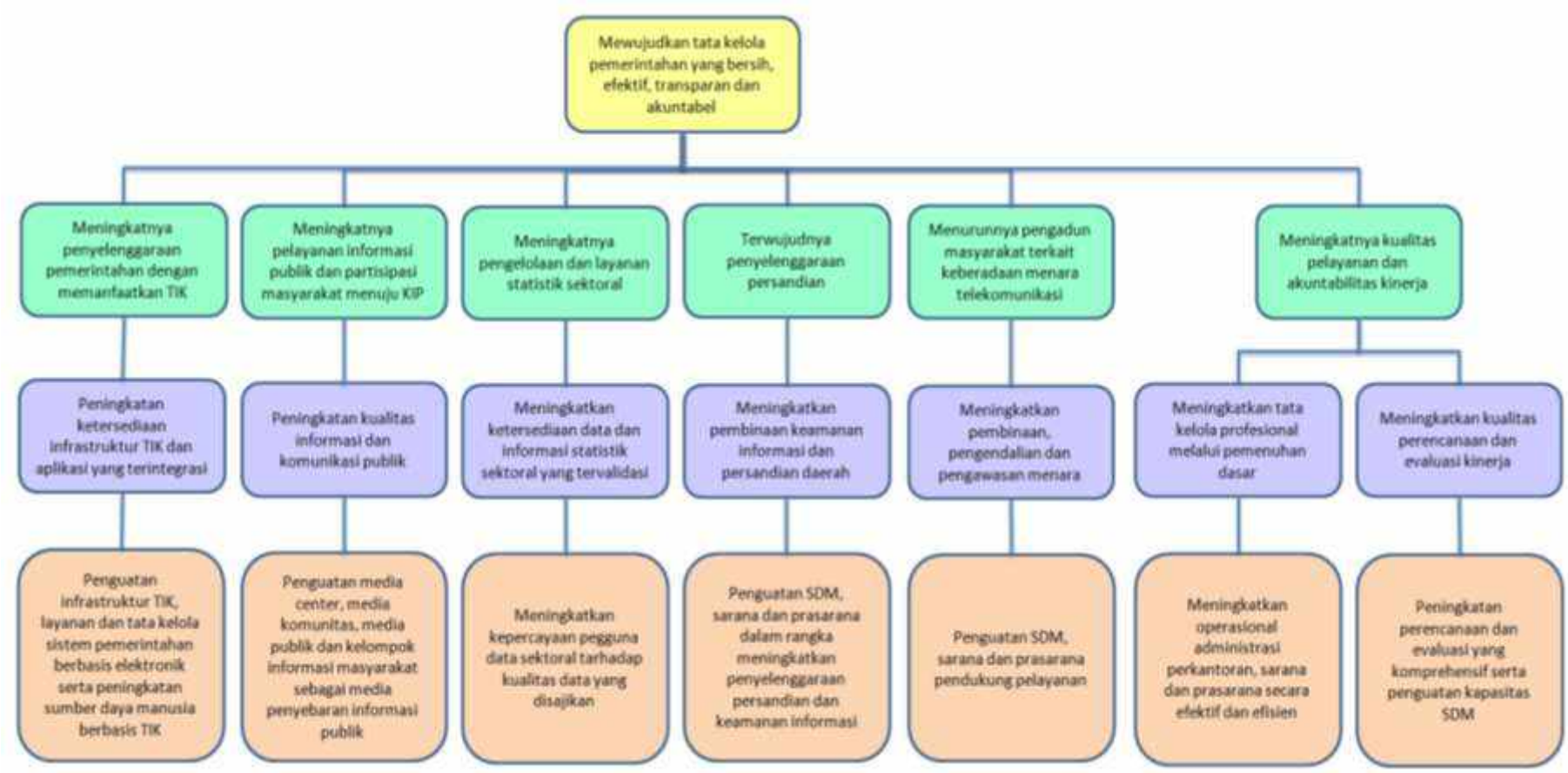

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon yang direncanakan untuk periode tahun 2020–2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.1. (terlampir)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah tujuan dan sasaran yang diukur berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang menggambarkan indikasi kinerja organisasi lebih baik dari sebelumnya.

Apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data yang memadahi, maka kondisi yang ada akan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal *(reliable)* tentang apa saja yang berhasil diperoleh selama berkegiatan. Dengan indikator kinerja, perencanaan telah menetapkan alat ukur untuk menentukan ketercapaian tujuan dan sasaran.

Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta harus didukung pencapaiannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, yaitu :

- **Misi Keempat :** Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung olehn peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
- **Tujuan :** Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi desa
- **Sasaran :** Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik

Tabel 7.1. (T-C.28)
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Indeks SPBE	2.63	2.93	3.18	3.38	3.50	3.63	3.63

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon disamping sebagai Perangkat Daerah penanggungjawab terpenuhinya target Indikator Sasaran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024, juga berkewajiban memenuhi target 5 (lima) indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon selama 5 (lima) tahun mendatang, yaitu :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks keterbukaan Informasi Publik	55.25 POIN	56.63	58.05	59.79	61.88	64.05	64.05
2.	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	40 %	36,50	50	61	76,50	90	90
3.	Meningkatnya keamanan sistem persandian	Indeks KAMI	II LEVEL	II	II	III	III	IV	IV
4.	Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	10 %	10	9	8	7	6	6
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Indeks kepuasan masyarakat	3.25 POIN	3.55	3.65	3.85	3.95	4.00	4.00

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Dinas Komunikasi dan informatika berkewajiban memenuhi indikator yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7.3.
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang Mengacu Permendagri No. 86 Tahun 2017

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Urusan Komunikasi dan Informatika							
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	20	20	40	60	80	100	100
2	Cakupan layanan telekomunikasi	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	n/a	-	-	-	-	-	-
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	n/a	-	-	-	-	-	-
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	n/a	-	-	-	-	-	-
	Urusan Statistik							
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku “kabupaten dalam angka”	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Buku ‘PDRB”	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	Urusan Persandian							
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0	6	18	39	67	100	100

Tabel 7.4
Formulasi Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan PD	Indikator Tujuan	Formulasi	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel	Indeks SPBE	$= \frac{\sum \textbf{jawaban x bobot}}{\sum \boldsymbol{pertanyaan}}$ Ket : Penilaian dari 3 indikator yang dikaji : 1. Kebijakan internal 2. Tata kelola SPBE 3. Layanan SPBE (Hasil evaluasi KEMENPAN RB)	2.93	3.18	3.38	3.50	3.63

Tabel 7.5
Formulasi Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran PD	Indikator Sasaran	Formulasi	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	$\frac{\sum \text{ jawaban x bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$ (Hasil evaluasi KEMENPAN RB)	2.93 POIN	3.18	3.38	3.50	3.63
Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	$\frac{(\text{verifikasi SAQ} + \text{VLA} + \text{Visitasi})}{\text{Total komponen}}$ (Hasil evaluasi Komisi Informasi Pusat) Ket : SAQ = Self Assessment Quesioner VLA = Verifikasi Lanjutan Acak	56.63 POIN	58.05	59.79	61.88	64.05
Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	$\frac{(\%\text{dokumen yang dihasilkan} + \%\ \%\text{keterisian data SIPD})}{\text{Total komponen}} x100\%$	36,50 %	50	61	76,50	90
Terwujudnya penyelenggaraan persandian	Indeks KAMI	$\frac{\sum \text{ jawaban x bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$	II LEVEL	II	III	III	IV
Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi	Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	$\frac{\sum \text{ menara telekomunikasdi yang diadukan}}{\sum \text{menara telekomunikasi}}$	10 %	9	8	7	6
Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah yang professional	Indeks kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Total dari persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$ x nilai penimbang	3.55 POIN	3.65	3.85	3.95	4.00

Tabel 7.6
Formulasi Perhitungan Indikator Program Dinas Komunikasi dan Informatika

Program	Indikator Program	Formulasi	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks aspek tata kelola SPBE	$\frac{\sum \text{jawaban x bobot}}{\sum \text{pertanyaan}}$ (Hasil evaluasi Komisi Informasi Pusat)	2.93	3.18	3.38	3.50	3.63
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	$\frac{\sum \text{realisasi layanan informasi dan komunikasi publik}}{\sum \text{layanan informasi dan komunikasi publik}} x100\%$	80%	85%	90%	95%	100%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan	$\frac{\sum \text{dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral}}{\sum \text{ltotal dokumen statistik daerah}} x100\%$	13%	35%	52%	78%	100%
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon	$\frac{\sum \text{data statistik sektoral yang diinput}}{\sum \text{data statistik sektoral yang tersedia}} x100\%$	60%	65%	70%	75%	80%
Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	$\frac{\sum \text{PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi sandi antar PD}}{\sum \text{total PD}} x100\%$	6%	18%	39%	67%	100%
Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Menara Telekomunikasi	Persentase menara telekomunikasi yang diawasi	$\frac{\sum \text{menara telekomunikasi yang diawasi}}{\sum \text{menara telekomunikasi}} x100\%$	65%	70%	75%	80%	85%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{pelayanan yang disediakan}}{\sum \text{pelayanan yang dibutuhkan}} x100\%$	80%	85%	90%	95%	100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{sarana dan prasarana yang dibutuhkan}}{\sum \text{sarana dan prasarana yang dibutuhkan}} x100\%$	80%	85%	90%	95%	100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	$\frac{\sum \text{Aparatur yang disiplin}}{\sum \text{Aparatur}} x100\%$	80%	85%	90%	95%	100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undanga	$\frac{\sum \text{dokumen capaian kinerja tepat waktu dan sesuai peraturan perundang – undangan}}{\sum \text{dokumen capaian kinerja dan keuangan}} x100\%$	100%	100%	100%	100%	100%
Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral	Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	$\frac{\sum \text{dokumen perencanaan tepat waktu dan sesuai peraturan perundang – undanga}}{\sum \text{dokumen perencanaan}}$	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII
PENUTUP

8.1 KESIMPULAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika . Disamping itu Renstra ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 akan menjadi pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka “Memperkuat Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”.

8.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024. Atas dasar itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran *(impact)* Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan *(output)* Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;

Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilakukan melalui Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon setiap tahun dengan realisasi melalui DPA-Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON

Drs. H. IMRON, M.Ag

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,63 POIN	2,93	21.938.049.000	3,18	26.253.082.000	3,38	28.844.632.000	3,5	29.537.032.000	3,63	30.173.252.000	3,63	136.746.047.000		
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi			Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,57 POIN	2,84	14.205.000.000	3,1	17.230.000.000	3,3	19.844.000.000	3,42	20.112.800.000	3,55	21.086.720.000	3,55	92.478.520.000		
		21.	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	Indeks aspek teknologi informasi dan komunikasi	2,67 POIN	2,97	14.205.000.000	3,22	17.230.000.000	3,43	19.844.000.000	3,55	20.112.800.000	3,67	21.086.720.000	3,67	92.478.520.000		
		21.01.	Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Diperpanjangnya layanan domain utama dan layanan sub domain	1 domain	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		21.02.	Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan	Jumlah layanan publik dan kepemerintahan yang terintegrasi	0 layanan publik	2	750.000.000	3	750.000.000	4	750.000.000	5	750.000.000	6	750.000.000	20	3.750.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		21.03.	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi	Jumlah aplikasi umum dan aplikasi khusus yang terintegrasi	0 aplikasi	2	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	18	1.350.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		21.04.	Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah	Jumlah aparatur SDM TIK pemerintah daerah tersertifikasi	0 orang	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	100	500.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		21.05.	Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalam Penggunaan Aplikasi Elektronik	Jumlah operator aplikasi elektronik yang tersertifikasi	0 orang	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	50	250.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		21.06.	Peningkatan SDM Masyarakat Pengguna Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan/bimtek dan jumlah relawan TIK	0 orang	110	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	200	300.000.000	910	1.500.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		21.07.	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	Penyelenggaraan koordinasi dalam rangka mewujudkan Kabupaten Cirebon Smart City	1 kegiatan	1	155.000.000	1	160.000.000	1	170.000.000	1	180.000.000	1	207.360.000	5	872.360.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		21.08.	Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO)	Sertifikasi kompetensi GCIO	0 orang	7	100.000.000	10	120.000.000	12	144.000.000	15	172.800.000	20	207.360.000	64	744.160.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		21.09.	Penyusunan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Nama Domain dan e-Government (SPBE)	Jumlah regulasi dan kebijakan mengenai domain dan indeks SPBE	0 dokumen	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.500.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		21.10.	Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Belanja bandwith internet, jumlah downline akses dan jumlah penerima akses	1 layanan	1	3.500.000.000	1	3.500.000.000	1	4.200.000.000	1	4.200.000.000	1	5.040.000.000	5	20.440.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		21.11.	Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah	Jumlah stakeholder pengguna database management system dan jumlah pengunduh data dan informasi secara elektronik	0 layanan	1	300.000.000	1	300.000.000	1	360.000.000	1	360.000.000	1	432.000.000	5	1.752.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		21.12.	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Sertifikasi Data Center dan presentase operasional Data Center	0 layanan	1	6.000.000.000	1	8.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	1	10.000.000.000	5	44.000.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		21.13.	Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah website lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan yang dapat diakses	0 website	5	150.000.000	10	150.000.000	15	150.000.000	20	150.000.000	25	150.000.000	75	750.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		21.14.	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	Jumlah promosi dan sosialisasi layanan publik berbasis elektronik	0 kegiatan	1	200.000.000	1	200.000.000	1	20.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	820.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		21.16.	Operasional Cirebon Command Center	Cakupan operasional Kabupaten Cirebon Command Center	1 layanan	1	2.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	1	3.000.000.000	5	14.000.000.000	BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo Kabupaten Cirebon
	Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan informasi publik			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	55,52 POIN	56,63	3.030.000.000	58,05	3.095.000.000	59,79	3.160.000.000	61,88	3.235.000.000	64,05	3.350.000.000	64,05	15.870.000.000		
		20.	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	Persentase layanan informasi dan komunikasi publik	52,5 PERSEN	52,5	3.030.000.000	65	3.095.000.000	77,5	3.160.000.000	90	3.235.000.000	100	3.350.000.000	100	15.870.000.000		
		20.02.	Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah bintek dan monitoring opini dan aspirasi publik	0 paket	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		20.06.	Produksi Konten Informasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang dibuat dan dipublikasikan	200 konten	365	400.000.000	365	400.000.000	365	400.000.000	365	400.000.000	365	400.000.000	1.825	2.000.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		20.07.	Penyediaan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah layanan peningkatan kapasitas PPID dan publikasi yang disampaikan kepada masyarakat	2 layanan	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	4	600.000.000	20	3.000.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		20.09.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi	0 paket	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	5	1.150.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		20.10.	Penyebarluasan informasi Publik melalui Media	Jumlah media yang digunakan dalam diseminasi informasi	2 media	1	460.000.000	3	480.000.000	3	500.000.000	3	530.000.000	3	600.000.000	13	2.570.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		20.11.	Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	Jumlah media komunikasi yang dikelola	1 media	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.500.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		20.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah diseminasi informasi melalui media tradisional dan media interpersonal	2 media	2	470.000.000	2	490.000.000	2	510.000.000	2	530.000.000	2	550.000.000	10	2.550.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		20.14.	Dukungan Administrasi Komisi Informasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya penanganan sengketa informasi publik di lingkup Kabupaten Cirebon	1 tahun	1	350.000.000	1	375.000.000	1	400.000.000	1	425.000.000	1	450.000.000	5	2.000.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		20.15.	Koordinasi Pelaksanaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah koordinasi bidang informasi dan komunikasi publik	0 tahun	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	5	350.000.000	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	Diskominfo Kabupaten Cirebon
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah			Persentase pengelolaan dan layanan statistik sektoral	36,5 PERSEN	36,5	740.617.000	50	1.925.000.000	61	1.170.000.000	76,5	2.295.000.000	90	1.920.000.000	90	8.050.617.000		
		18.	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	Persentase dokumen hasil pengolahan dan analisis statistik sektoral yang dihasilkan	13 PERSEN	13	467.617.000	35	1.650.000.000	52	890.000.000	78	2.010.000.000	100	1.630.000.000	100	6.647.617.000		
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kabupaten Cirebon	60 PERSEN	60	273.000.000	65	275.000.000	70	280.000.000	75	285.000.000	80	290.000.000	350	1.403.000.000		
		18.08.	Koordinasi Statistik Sektoral	Cakupan pelaksanaan koordinasi statistik sektoral	0 tahun	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	5	300.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		18.09.	Pengolahan Updating, Analisis Data dan Statistik Daerah	Penyelenggaraan pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	1 Dokumen	1	99.617.000	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	5	559.617.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		18.10.	Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB	Jumlah dokumen PDRB Kec yang disusun	1 dokumen	1	368.000.000	1	370.000.000	1	380.000.000	1	390.000.000	1	400.000.000	5	1.908.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		18.11.	Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Jumlah dokumen IPM yang disusun	1 dokumen	0	0	1	780.000.000	0	0	1	800.000.000	0	0	2	1.580.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		18.12.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Survei Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA)	Jumlah dokumen SUSEDA yang disusun	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	700.000.000	1	700.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		18.13.	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah IKM yang disusun	0 dokumen	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4	1.600.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		18.14.	Pengolahan Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Persentase ketersediaan data yang dikelola	60 Prosen	60	213.000.000	65	215.000.000	70	220.000.000	75	225.000.000	80	230.000.000	350	1.103.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		18.15.	Pengumpulan Data Nilai Tukar Petani (NTP)	Jumlah dokumen NTP yang disusun	0 dokumen	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	1	300.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
	Terwujudnya penyelenggaraan persandian			Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2 LEVEL	2	970.000.000	2	770.000.000	3	820.000.000	3	820.000.000	4	820.000.000	4	4.200.000.000		
		19.	**Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah	0 PERSEN	6	970.000.000	18	770.000.000	39	820.000.000	67	820.000.000	100	820.000.000	100	4.200.000.000		
		19.03.	Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik	Jumlah sosialisasi/bimtek melalui sertifikat elektronik	0 kegiatan	2	100.000.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	850.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		19.06.	Pengembangan Layanan Keamanan Informasi	Jumlah pelayanan keamanan informasi	0 layanan	1	150.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.350.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		19.07.	Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi	Jumlah pemenuhan kebutuhan saraan dan prasarana pengamanan informasi	0 paket	1	600.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	1.400.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		19.08.	Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah sosialisasi dalam menyelenggarakan jaring sandi	0 kegiatan	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	10	500.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		19.09.	Koordinasi dalam Rangka Pengamanan Informasi	Jumlah koordinasi bidang persandian yang terfasilitasi	0 tahun	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	100.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
	Menurunnya pengaduan masyarakat terkait keberadaan menara telekomunikasi			Persentase pengaduan keberadaan menara telekomunikasi	10 PERSEN	10	300.000.000	9	300.000.000	8	300.000.000	7	300.000.000	6	300.000.000	6	1.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		22.	**Program Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Menara Telekomunikasi**	Persentase menara telekomunikasi yang diawasi	65 PERSEN	65	300.000.000	70	300.000.000	75	300.000.000	80	300.000.000	85	300.000.000	85	1.500.000.000		
		22.01.	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Jumlah lokasi menara telekomunikasi yang diawasi	40 kecamatan	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	200	1.500.000.000	BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	Diskominfo Kabupaten Cirebon
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon			Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25 POIN	3,55	2.692.432.000	3,65	2.933.082.000	3,85	3.550.632.000	3,95	2.774.232.000	4	2.696.532.000	4	14.646.910.000		
		01.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	75 PERSEN	80	1.503.700.000	85	1.540.350.000	90	1.577.900.000	95	1.611.500.000	100	1.648.800.000	100	7.882.250.000		
		01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun	4 jenis	3	375.000.000	3	380.000.000	3	385.000.000	3	390.000.000	3	395.000.000	15	1.925.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya	21 Unit	22	13.000.000	23	13.650.000	24	14.500.000	25	15.000.000	26	15.800.000	120	71.950.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah luasan kantor yang dibersihkan	1.896 m2	1.896	180.000.000	1.896	180.000.000	1.896	180.000.000	1.896	180.000.000	1.896	180.000.000	9.480	900.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.09.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	4 unit	4	32.000.000	5	32.000.000	5	34.000.000	5	34.000.000	5	35.000.000	24	167.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	38 jenis	32	54.000.000	38	57.000.000	38	59.000.000	38	62.000.000	38	65.000.000	184	297.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	15 jenis	12	19.700.000	15	19.700.000	15	19.900.000	15	20.000.000	15	20.000.000	72	99.300.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	1 jenis	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	5	60.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 jenis	4	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	24	300.000.000	100	1.500.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.14.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis	3	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000	19	125.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 jenis	3	25.000.000	3	25.000.000	3	27.500.000	3	27.500.000	3	30.000.000	15	135.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu, arsiparis dan rapat pegawai	1 tahun	1	13.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	5	77.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	1 tahun	1	275.000.000	1	300.000.000	1	325.000.000	1	350.000.000	1	375.000.000	5	1.625.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		01.20.	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor	Tersedianya jumlah jasa keamanan dan ketertiban kantor	0,25 tahun	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	5	900.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		02.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	75 PERSEN	80	956.000.000	85	1.160.000.000	90	1.735.000.000	95	920.000.000	100	765.000.000	100	5.536.000.000		
		02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor	0 gedung	1	0	1	0	1	1.000.000.000	1	0	1	0	5	1.000.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		02.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	1 Unit	1	350.000.000	0	0	1	320.000.000	0	0	1	320.000.000	3	990.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		02.10.	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	5 jenis	7	186.000.000	8	190.000.000	8	195.000.000	8	200.000.000	8	225.000.000	39	996.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 gedung	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	15	600.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		02.24.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Presentase kendaraan dinas/ operasional dalam keadaan baik	100 Prosen	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	500	500.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		02.42.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki	1 paket	1	200.000.000	1	750.000.000	0	0	1	500.000.000	0	0	3	1.450.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		03.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	Terpenuhinya peningkatan disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	75 PERSEN	80	53.000.000	85	53.000.000	90	58.000.000	95	58.000.000	100	63.000.000	100	285.000.000		
		03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	59 stel	1	0	1	53.000.000	1	0	1	58.000.000	1	0	5	111.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		03.05.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	59 stel	60	53.000.000	0	0	60	58.000.000	0	0	60	63.000.000	180	174.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		06.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100 PERSEN	100	139.732.000	100	139.732.000	100	139.732.000	100	144.732.000	100	144.732.000	100	708.660.000		
		06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	9 dokumen	10	75.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	10	80.000.000	10	80.000.000	50	385.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		06.02.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran	13 dokumen	13	47.574.000	13	47.574.000	13	47.574.000	13	47.574.000	13	47.574.000	65	237.870.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		06.04.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	1	17.158.000	1	17.158.000	1	17.158.000	1	17.158.000	1	17.158.000	5	85.790.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
		07.	**Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral**	Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	100 PERSEN	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	75.000.000	100	235.000.000		
		07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	2 dokumen	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	3	75.000.000	11	235.000.000	SEKRETARIAT DISKOMINFO	Diskominfo Kabupaten Cirebon
TOTAL PENDANAAN						**21.938.049.000**		**26.253.082.000**		**28.844.632.000**		**29.537.032.000**		**30.173.252.000**		**136.746.047.000**			

Sumber, 08 Nopember 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUGENG DARSONO, SH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620718 198603 1 003